



Potensi Industri Bisnis di Tangerang Selatan

Jumino

Universitas Pamulang
dosen01803@unpam.ac.id

Kata kunci:	Abstrak
Ekonomi Regional, Metode Location Quotient	Artikel ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekonomi yang unggul di Kota Tangerang Selatan sebagai studi Ekonomi Regional. Metode yang digunakan adalah Location Quotient, yang membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah sektor di tingkat yang lebih tinggi/nasional. Kota Tangerang Selatan memiliki posisi geografis yang strategis, terletak di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Kota Tangerang Selatan juga merupakan daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta berdasarkan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek. Wilayah Kota Tangerang Selatan tumbuh pesat karena menjadi tempat berbagai kegiatan dari Ibu kota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain, kota ini juga dapat menjadi daerah pengembangan wilayah Kabupaten Bogor dan memiliki sumber daya alam yang produktif. Penelitian ini fokus pada analisis sektor potensial berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 8 sektor potensial di wilayah Kota Tangerang Selatan, yaitu sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Berdasarkan potensi ini, strategi peningkatan daya saing daerah meliputi tiga pendekatan. Pertama, strategi berbasis keunggulan kompetitif daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah (SIDa). Kedua, strategi berbasis komoditi unggulan melalui gerakan One Village One Product (OVOP). Ketiga, strategi pembangunan tidak seimbang melalui pembangunan industri berbasis pertanian (agroindustri).

Pendahuluan

Pemerintah melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah”, mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing – masing berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah.

Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kewenangan atau otonomi daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,

peradilan, agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan dalam pembiayaan, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alam yang ada di daerah tersebut tanpa adanya intervensi dari Pemerintah Pusat.

Kota Tangerang Selatan selama beberapa tahun terakhir ini terus mendorong berbagai sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menjadi bagian dari sebuah Penyangga Perekonomian Ibu Kota dengan letak yang strategis dan suatu kawasan yang dinamis, telah memiliki banyak potensi, namun terus menerus berupaya untuk memacu tumbuhnya industri manufaktur yang memberi nilai tambah lebih besar. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia, yang didalamnya adalah Warga atau Penduduk Kota Tangerang khususnya. Dimana nilai rupiah yang dibelanjakan untuk digunakan berbagai kegiatan, contohnya dalam mengkonsumsi barang dan jasa, akan bertambah lebih besar lagi.

Maju atau tidaknya suatu perekonomian daerah dapat diukur dengan menggunakan pertumbuhan ekonominya atau perkembangan PDRB, terhadap jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat untuk setiap periodenya, oleh karena itu pengembangan sektor sektor unggulan harus diperhatikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian semakin tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan juga menimbulkan masalah lain yaitu terhadap pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau daerah tertentu dalam hal ini disebabkan adanya perbedaan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur serta potensi sumber daya lainnya.

Ketimpangan yang cukup tinggi akan berdampak buruk terhadap kestabilan ekonomi. Pada penelitian ini, Peneliti hanya memfokuskan pada Kota Tangerang Selatan, dimana terdapat upaya atau strategi seperti apa dan bagaimana dalam mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dalam pembangunan ekonomi regional, perlu suatu keseimbangan dan keserasian yang ideal di berbagai sektor yang ada, dengan cara terus berpacu dan meningkatkan serta memilih potensi produk unggulan didalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri dari 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

Berlakunya otonomi daerah sesuai Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dengan demikian daerah kabupaten dan kota telah memiliki kewenangan yang cukup luas, guna membuat perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kewenangan tersebut mencakup : perencanaan tata ruang, pembangunan wilayah dan juga pemanfaatan secara maksimal terhadap potensi-potensi di wilayah tersebut. Namun demikian pelimpahan wewenang tersebut memiliki suatu konsekuensi : tanggung jawab lebih besar, dimana daerah tersebut memiliki tanggung jawab terhadap maju dan mundurnya suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan tahun 2020 mencapai Rp59.538 Trilyun Rupiah yaitu terdapat 4 (empat) kontribusi terbesar : Transportasi dan Komunikasi 38,70%, Keuangan 30,03 % , Jasa-jasa 25,80 % dan Sektor Konstruksi 24,92%. , Dimana daerah tersebut harus dapat menetapkan skala prioritas dengan tepat guna atau sasaran dalam pemanfaatan potensi daerahnya masing-masing, namun harus tetap memperhatikan terhadap kelestarian lingkungan hidup agar pertumbuhan dapat tercipta yang serasi, selaras dan berkesinambungan.

Artikel ini bisa mengkaji bagaimana metode Location Quotient bisa membantu didalam menganalisa berkaitan klasifikasi sektor-sektor kegiatan ekonomi serta dapat mengulas lebih detail lagi bagaimana peran metode Location Quotient dapat digunakan, diterapkan untuk mengatasi dan mengembangkan Ekonomi Regional di Kota Tangerang Selatan.

Metode

Metode penelitian ini guna untuk menganalisis sektor-sektor potensial perekonomian Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari tiga tahap : Pertama yaitu persiapan penelitian dengan mencari literature serta referensi yang dapat dipercaya, dengan data pendukung dari berbagai sumber seperti Tinjauan Pustaka dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ). Metode ini membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah sektor di wilayah Tangerang Selatan dengan tingkat nasional. Jika $LQ > 1$, maka sektor tersebut dianggap sebagai basis potensial, sedangkan jika $LQ < 1$, maka sektor tersebut dianggap sebagai nonbasis.

Metode LQ walaupun ada beberapa kritik, seperti asumsi bahwa produktivitas atau konsumsira-rata antar wilayah adalah sama. Selain dari pada itu, juga perlu diperhatikan apakah produk yang dihasilkan untuk kebutuhan lokal atau diekspor. Oleh karena itu, harus perlu dilakukan teknik minimum requirement guna menghindari double counting dan memperoleh ranking sektor yang relevan.

Tahap ketiga, yaitu penyusunan laporan hasil penelitian yang menjadi referensi dan strategi untuk meningkatkan pengembangan serta pertumbuhan, pemerataan, dan potensi ekonomi unggulan di Kota Tangerang Selatan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah untuk sinkronisasi terhadap kebijakan ekonomi nasional, mengingat Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah penyangga ekonomi Ibukota Negara Republik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Ilmu Ekonomi Regional merupakan cabang baru dalam ilmu ekonomi yang berkembang, yang berkaitan dengan analisis potensi ekonomi wilayah. Perencana wilayah perlu mampu menganalisis sektor-sektor mana yang harus dikembangkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah. Oleh karena itu dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kebebasan lebih luas lagi didalam menetapkan untuk sektor-sektor yang diprioritaskan.

Pemerintah Daerah mempunyai penanan yang sangat penting untuk melihat sektor-sektor dengan keunggulan komparatif menjadi skala prioritas. Keunggulan tersebut bisa terkait dengan kondisi sumber daya alam, penguasaan teknologi mutakhir, ketrampilan khusus masyarakat, kedekatan dengan pasar, aksesibilitas yang tinggi, konsentrasi kegiatan sejenis, aglomerasi, upah buruh rendah, mentalitas masyarakat yang mendukung, dan kebijakan pemerintah.

Dalam Ilmu Ekonomi Regional tentunya membahas pertanyaan mengenai dimana dan mengapa suatu kegiatan sebaiknya dilakukan di wilayah tertentu. Dalam menentukan lokasi, ilmu ekonomi regional memberikan arahan sampai batas wilayah yang dipilih, namun untuk menentukan tempat kegiatan secara spesifik memerlukan bantuan dari ilmu lain, seperti ilmu kesesuaian lahan.

Sektor unggulan adalah sektor yang berperan besar dalam perkembangan perekonomian wilayah. Kriteria sektor unggulan meliputi pertumbuhan ekonomi tinggi, penyerapan tenaga kerja besar, keterkaitan antar sektor, dan penciptaan nilai tambah tinggi. Komoditas unggulan adalah komoditas andalan dengan posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Penetapan komoditas unggulan didasarkan pada pertimbangan teknis dan sosial ekonomi. Pemerintah perlu membuat program suatu kebijakan yang sesuai dengan keadaan daerah dan memperhatikan sektor unggulan dalam perencanaan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan berkelanjutan.

Metode atau cara mencapai tujuan yang ditetapkan meliputi diagram alir penelitian yang menggambarkan suatu langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan, serta jadwal

penelitian yang diusulkan. Diagram alir harus menyertakan penahapan yang jelas, indikator capaian yang ditargetkan, dan tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

PDRB Kota Tangerang Selatan Dan PDRB Provinsi Banten

Penelitian ini bersumber berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk melihat secara rinci masing-masing untuk PDRB Kota Tangerang Selatan Dan PDRB Provinsi Banten sebagai dasar analisis yang mendukung penelitian seperti pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1			
PDRB KOTA TANGERANG SELATAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah)			
<i>Klasifikasi Lapangan Usaha</i>	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	114,89	115,72	117,78
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C. Industri Pengolahan	4.572,77	4.649,36	5.037,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	56,34	58,74	64,88
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,20	31,97	33,01
F. Konstruksi	7.914,40	8.847,75	9.384,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.561,54	9.822,62	10.535,02
H. Transportasi dan Pergudangan	1.735,21	1.919,89	2.039,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.699,82	1.782,65	1.939,11
J. Informasi dan Komunikasi	10.581,04	11.288,91	12.040,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	802,54	841,80	843,68
L. Real Estate	11.434,56	11.794,74	12.503,61
M, N. Jasa Perusahaan	1.924,70	1.904,29	2.038,17
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	611,03	579,93	622,55
P. Jasa Pendidikan	4.344,13	4.301,99	4.250,79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.579,87	2.861,33	2.888,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.568,06	1.591,42	1.682,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	59.531,10	62.393,11	66.021,88
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan			

Kategori Lapangan Usaha PDRB	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.998,27	40.199,75	44.050,68
B. Pertambangan dan Penggalian	4.269,64	4.658,86	4.142,44
C. Industri Pengolahan	195.331,62	209.815,06	227.675,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.504,20	12.140,42	13.016,30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	550,95	585,16	612,68
F. Konstruksi	71.551,76	82.113,95	91.202,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	83.240,61	85.898,99	93.547,29
H. Transportasi dan Pergudangan	40.458,22	41.693,88	71.165,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.154,34	15.890,83	17.447,46
J. Informasi dan Komunikasi	25.200,74	26.574,75	28.218,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	20.300,42	22.323,34	25.307,29
L. Real Estate	54.258,20	56.397,21	60.289,40
M,N. Jasa Perusahaan	7.325,21	7.329,42	7.914,75
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14.210,48	14.457,87	15.227,22
P. Jasa Pendidikan	24.495,93	24.346,20	24.581,06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.183,12	10.298,33	10.687,98
R,S,T,U. Jasa lainnya	10.861,69	11.163,47	12.163,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	625.895,40	665.887,49	747.250,31
Sumber : BPS Provinsi Banten			

Analisis LQ PDRB Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan dari data-data yang telah diperoleh masing-masing untuk PDRB Kota Tangerang dan PDRB Provinsi Banten (seperti yang disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2) diatas, peneliti telah melakukan analisis yang diperlukan dalam penelitian ini dengan hasil seperti yang disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut :

Kategori Lapangan Usaha PDRB	2020	2021	2022	Rata-rata (+/-)	Basis/Non Basis
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,03	0,03	0,03 -	Non Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	Non Basis
C. Industri Pengolahan	0,25	0,24	0,25	0,24 -	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,06	0,05 -	Non Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,58	0,58	0,61	0,59 -	Non Basis
F. Konstruksi	1,16	1,15	1,16	1,16 +	Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,21	1,22	1,27	1,23 +	Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0,45	0,49	0,32	0,42 -	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,20	1,26	1,21 +	Basis
J. Informasi dan Komunikasi	4,41	4,53	4,83	4,59 +	Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,40	0,38	0,40 -	Non Basis
L. Real Estate	2,22	2,23	2,35	2,27 +	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	2,76	2,77	2,91	2,82 +	Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,45	0,43	0,46	0,45 -	Non Basis
P. Jasa Pendidikan	1,86	1,89	1,96	1,90 +	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,95	2,97	3,06	2,99 +	Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,52	1,52	1,57	1,54 +	Basis
Sumber : Data diolah peneliti					

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa yang menjadi sektor unggulan atau sektor basis maupun non basis di Kota Tangerang Selatan. Sektor basis dan non basis dapat dihitung melalui rumus dan juga analisis LQ (Location Quotations). Model analisis ini dihitung dengan membandingkan seberapa besarnya peranan salah satu sektor pada suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap besarnya peran sektor tersebut pada tingkat provinsi. Analisis ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi berapa potensi internal (sektor basis) yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan dan sektor non basis. Apabila indeks $LQ > 1$, dapat dikatakan bahwa sektor tersebut menjadi sektor basis. Dan $LQ = 1$, sektor tersebut dapat dikatakan hanya mampu untuk memenuhi permintaannya di wilayahnya sendiri, sedangkan apabila $LQ < 1$, sektor tersebut dikatakan sebagai sektor non basis. Berdasarkan dari perhitungan LQ diatas, diketahui hasil rata-rata nilai LQ pada sektor basis dan non basis di wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2022. Hasil analisis LQ ke 8 (delapan) sektor dibawah ini memiliki hasil $LQ > 1$.

8 (delapan) sektor potensial (basis) di wilayah Kota Tangerang Selatan, yaitu terdiri dari sektor :

- F. Konstruksi
- G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J. Informasi dan Komunikasi
- L. Real Estate
- M,N. Jasa Perusahaan
- P. Jasa Pendidikan
- Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sedangkan pada sektor yang memiliki hasil $LQ < 1$, merupakan sektor non basis yaitu sektor :

- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- B. Pertambangan dan Penggalian
- C. Industri Pengolahan
- D. Pengadaan Listrik dan Gas
- E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- H. Transportasi dan Pergudangan
- K. Jasa Keuangan dan Asuransi
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Kota Tangerang Selatan memiliki sektor-sektor potensial (basis) yang dominan dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor-sektor tersebut meliputi konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Potensi sektor-sektor ini perlu dipertahankan dan dikembangkan agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan disarankan untuk memberikan perhatian dan dukungan pada sektor-sektor non-basis yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Sektor-sektor tersebut meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan dan asuransi; serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah.

Daftar Pustaka

- Hidayat, A. R. T., & Asmara, A. Y. (2017). Creative Industri in Supporting Economy Growth in Indonesia, Perspective of Regional Innovation System. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 70. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten menurut Lapangan Usaha 2015-2019. Banten.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Selatan menurut Lapangan Usaha 2015-2020. Kota Tangerang Selatan.
- Muljarijadi, B. (2011). Pembangunan Ekonomi Wilayah Pendekatan Analisis Tabel Input Output. Bandung: Penerbit Unpad Press.
- Dobrescu, E. M., & Dobre, E. M. (2014). Theories regarding the role of the growth poles in the economic integration. *Procedia Economics and Finance*, 8, 262-267.
- Junaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. (2015). Ekonomi Pembangunan. FIB Universitas Sam Ratulangi Manado.